



Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

KAJIAN AKTUAL RESEARCH DESIGN DAN INSTRUMEN SURVEY

***Penyusunan
Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
di Kab. Ogan Komering Ilir***

2020



RESEARCH DESIGN DAN INSTRUMEN SURVEY (RD/IS)

KAJIAN AKTUAL

**PENYUSUNAN PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN 2020



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Halaman Judul	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	3
Latar Belakang Masalah	5
Rumusan Masalah	7
Tujuan	9
Bab II Kerangka Teoritik	11
Pembahasan	11
Kemiskinan Absolut dan Relatif	12
Ciri-ciri Kemiskinan	13
Tiga Masalah.....	14
Akar Penyebab Kemiskinan.....	15
Perangkap Kemiskinan.....	16
Upaya Penanggulangan Kemiskinan	17
Learning From The People	18
Prasyarat.....	19
Metode dan Prosedur Kerja.....	21
Bab III Metode Penelitian.....	22



Pendekatan Penelitian	23
Jenis Penelitian	24
Lokasi Penelitian	25
Teknik Pengambilan Sampel.....	26
Teknik Pengumpulan Data.....	27
Teknik Pengolah Data	28
Analisis Data.....	29
Instrumen Survey	30
Penutup	31
Kesimpulan	34
Daftar Pustaka	37



PROPOSAL

PENYUSUNAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan sesungguhnya telah menjadi agenda prioritas yang disepakati dalam kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, komitmen pemerintah daerah di bidang penanggulangan kemiskinan telah ditegaskan dan dirumuskan dalam berbagai program pembangunan daerah yang *pro poor*. Yang dimaksud kebijakan *pro poor* di sini adalah kebijakan dan program pembangunan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat miskin dan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat berkembang secara mandiri meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Menurut data, jumlah penduduk miskin se provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir berada tingkat kedua teratas dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi Sumatera Selatan. Dari data BPS (2019), sebanyak 180.670 jumlah penduduk miskin di Kota Palembang, jumlah penduduk miskin 124.140 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 105.830 di kabupaten Musi Banyuasin. Adapun kabupaten terendah adalah Kota Pagar Alam sebanyak 12.370. Walaupun di beberapa bagian, program-program yang telah dikembangkan Pemerintah daerah terbukti mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Tetapi, karena sebagian program dan kegiatan yang digulirkan masih kurang terfokus, dan acapkali pula kurang kontekstual, maka yang terjadi kemudian efek daya ungkitnya



sangat terasa kurang maksimal. Kendati, nama dan judul proyek yang dirumuskan dan dilakukan masing-masing SKPD berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi kalau dilihat substansinya, maka bisa kita lihat isi program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan sebetulnya selalu berkaitan dengan dua hal.

Pertama, berupa bantuan atau kegiatan yang cenderung bersifat karitatif — yakni bantuan program penanggulangan kemiskinan yang pada dasarnya hanya bertujuan untuk menyelamatkan atau meringankan beban keluarga miskin, tanpa ada manfaat yang lebih memiliki daya ungkit bagi kadar keberdayaan keluarga miskin itu sendiri. Berbagai kajian telah membuktikan, bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya karitatif semacam pemberian subsidi tunai langsung kepada masyarakat miskin, dikhawatirkan bukan saja akan mengikis pelan-pelan mekanisme *self-help* (menolong dirinya sendiri) yang selama ini dimiliki masyarakat miskin, tetapi juga disinyalir akan membuat masyarakat miskin makin tergantung pada subsidi dan belas-kasihan pihak lain, dan bahkan tidak mustahil mereka juga akan makin ter subordinasi. Alih-alih makin berdaya karena difasilitasi melalui berbagai program subsidi yang digulirkan pemerintah, dalam kenyataan acap terbukti posisi *bargaining* masyarakat miskin pelan-pelan makin terpojok, teralienasi dari dirinya sendiri, dan bahkan kehilangan sebagian dari harga dirinya.

Kedua, berupa jenis proyek atau kegiatan yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan cenderung melihat perubahan sebagai hal yang selalu bersifat linier. Berbagai bentuk proyek pengentasan kemiskinan seperti kegiatan pelatihan SDM dan manajemen usaha kecil, bimbingan teknis, bantuan modal usaha atau pemberian bantuan teknologi tepat guna yang semuanya diasumsikan akan dapat meningkatkan jumlah produksi dan kesejahteraan keluarga miskin, ternyata dalam kenyataan sering hanya melahirkan kekecewaan karena sifatnya yang meritokratis. Yang dimaksud



meritokratis di sini, karena kebijakan dan proyek semacam ini hanya terlihat egaliter di luar, tetapi sesungguhnya tidak memihak kepada masyarakat miskin karena mengabaikan kekakuan struktur yang terpolarisasi dan tidak menguntungkan masyarakat miskin. Bisa dibayangkan, apa yang bisa dilakukan penduduk miskin dengan bantuan modal usaha sekitar 500 ribu atau bahkan satu juta lebih sekali pun, jika mereka sama sekali tidak menguasai pasar, tidak memiliki akses atau jaringan yang bisa diandalkan untuk mencari peluang baru, dan lemah posisi tawarnya (*bargaining position*). Seberapa pun seorang pengusaha di sektor industri kecil meningkat omzet usahanya, tetapi jika keuntungan yang diambil pedagang perantara selalu lebih besar, maka jangan berharap mereka akan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kegiatan sebagaimana diusulkan bermaksud mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya penanganan masalah kemiskinan dan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang sifatnya *pro poor*. Kegiatan ini penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan sekaligus meningkatkan kinerja pembangunan yang optimal, khusus dalam rangka merumuskan program aksi daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1.2. Permasalahan

Secara garis besar, permasalahan yang dikaji dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran bentuk tekanan kemiskinan dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melangsungkan kehidupan sosial dan pengembangan usahanya?



2. Bagaimana gambaran mekanisme *survival* yang dikembangkan keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyasati tekanan krisis dan ancaman kemiskinan?
3. Apa saja sebetulnya yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang *pro poor* di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.3. Tujuan

Secara garis besar, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk tekanan kemiskinan dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melangsungkan kehidupan sosial dan pengembangan usahanya.
2. Mengidentifikasi mekanisme *survival* yang dikembangkan keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyasati tekanan krisis dan ancaman kemiskinan.
3. Mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang *pro poor* di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Merumuskan strategi, dan rencana aksi daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.



1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasikannya bentuk tekanan kemiskinan dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melangsungkan kehidupan sosial dan pengembangan usahanya.
2. Teridentifikasikannya mekanisme *survival* yang dikembangkan keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyiasati tekanan krisis dan ancaman kemiskinan.
3. Teridentifikasikannya berbagai kebutuhan masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya.
4. Teridentifikasikannya faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang *pro poor* di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Terumuskannya strategi, dan rencana aksi daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.



1.5. Jadwal Kegiatan

Menurut rencana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan ini adalah 4 bulan sejak kontrak ditandatangani, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan ke			
	1	2	3	4
Persiapan, pra-survey dan pengurusan ijin	X			
Penyusunan instrument	X			
Pengumpulan data primer	XX	XX		
Pengumpulan data sekunder	X	XX		
Editing data dan tabulasi		XX	X	
Pengolahan dan analisis data			XX	
Penulisan draft laporan			XX	
Perumusan strategi dan program			XX	XX
Seminar dan perbaikan laporan akhir				X
Penggandaan laporan				X

Keluaran kajian ini adalah laporan hasil kajian produk unggulan berkualitas sebagai bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah serta policy brief kepada Bupati Ogan Komering Ilir terkait perumusan kebijakan Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi dan kajian tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas umumnya masih simpang-siur. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda-beda. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan, dengan nada yang sama Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981: 1-3).

Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi — diakui atau tidak— kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.



Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Studi yang dilakukan Wignjosoebroto dkk., (1992) tentang kehidupan masyarakat rentan di Kota Surabaya menemukan bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang dijejas kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, sedangkan untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang subsisten saja bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.

Definisi yang lebih lengkap tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.



2.2. Kemiskinan Absolut dan Relatif

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Menurut kreteria Bank Dunia, (1) jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 % dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang Santa timpang; (2) jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 % dari pendapatan nasional, maka disebut ketidak merataan sedang; dan (3) jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 % dari pendapatan nasional, maka disebut ketidak-merataan rendah.

Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti : sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu. Kemudian, karena biaya hidup di daerah kota dan di daerah desa berbeda, demikian juga antara kelompok masyarakat di dalamnya, maka oleh Bank Dunia dipakai sebagai ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai US \$ 50 per kapikta per tahun untuk tingkat pendapatan di desa dan US \$ 75 per kapita per tahun untuk tingkat pendapatan di kota pada keadaan tingkat harga tahun 1971.



Di samping itu, ada juga pengertian kemiskinan lain yang dikembangkan oleh Sajogyo. Dikatakan bahwa, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Pada tahun 1973, WHO/FAO merekomendasi tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1.900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Dan, berdasarkan ukuran tersebut, Sajogyo telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut :

1. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya.
2. Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram per tahunnya.

Ada lagi ukuran khas tentang kemiskinan yang dipakai di Indonesia. Untuk mengatur ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat umum, termasuk golongan yang tidak kaya, maka pemerintah Republik Indonesia sejak lama telah menentukan sembilan bahan pokok hidup yang senantiasa dijaga jangan sampai harganya membumbung tinggi hingga tidak terbeli oleh sebagian besar dari rakyat, pun supaya jumlahnya di pasar bebas cukup banyak. Sembilan bahan pokok itu adalah : beras, gula, minyak goreng, minyak tanah, dan sebagainya yang selalu diperlukan dalam tiap-tiap rumah tangga para penduduk kampung atau desa. Apabila ada rumah tangga tertentu yang



terus-menerus tidak mampu mencukupi keperluan bahan-bahan pokok hidup itu menurut ukuran tertentu, maka rumah tangga itu dapat dianggap miskin.

2.3. Ciri-ciri Kemiskinan

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu :

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti : tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh assets produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan



sekolahnya oleh karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah tambahan.

4. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian.. tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusaha muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa itu. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara sedang berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).



2.4. Tiga Masalah

Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, pada dasarnya bisa dikategori dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) kelompok filantropis; (2) kelompok reformis; dan (3) kelompok revolusioner.

Pertama, kelompok filantropis. Kelompok ini tidak memandang masalah kemiskinan material dan kultural rakyat dalam kaitannya dengan kelembagaan dan struktur basisnya. Mereka berkeyakinan bahwa adalah mungkin untuk meningkatkan keadaan rakyat miskin melalui upaya kemanusiaan secara langsung, tanpa mengubah lembaga dan struktur yang ada.

Program-program ekonomis dan pendidikan disusun dan dikembangkan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, dengan cara-cara seperti pengumpulan dana-dana yang sifatnya karitatif untuk menolong penduduk yang membutuhkannya, ajakan-ajakan moral yang ditujukan kepada tuan-tuan tanah dan kelompok-kelompok lainnya untuk mengurangi tekanan-tekanan terhadap para petani, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya.

Ciri utama pandangan dan pendekatan programatik kelompok ini terhadap permasalahan terletak pada kenyataan bahwa mereka mencoba memperbaiki kehidupan rakyat miskin dalam kerangka lembaga-lembaga dan struktur yang telah ada, dengan cara-cara yang sepenuhnya didorong oleh pertimbangan kemanusiaan.

Kedua, kelompok reformis. Menurut kelompok ini, kesalahan berfungsinya sistem kemasyarakatan dan lembaga-lembaganya (dan bukan kesalahan asas sistem sosial dan kelembagaan itu sendiri) yang menjadi sebab-sebab sosial genetis dari kemalangan ekonomi, keterbelakangan sosial dan kultur rakyat. Oleh karena itu, mereka bekerja keras bagi berfungsinya sistem sosial dan kelembagaan yang ada secara sehat, atau



paling jauh memperbaruinya. Ditekankan bahwa sekali reformasi institusional ini dapat diselesaikan akan dapat dihasilkan perbaikan di seluruh bidang kehidupan rakyat miskin.

Ciri utama untuk mengenal pandangan dan pendekatan programatik kelompok ini pada suatu permasalahan terletak pada kenyataan bahwa untuk meningkatkan kehidupan rakyat, mereka tidak menganggap perlu menggantikan sistem sosial yang ada berikut kelembagaannya dengan sesuatu yang baru, melainkan cukup dengan memperbaikinya saja.

Ketiga, kelompok revolusioner. Titik tolak pandangan dan pendekatan programatik dari kelompok ini didasarkan pada suatu konsep revolusioner. Kemiskinan yang mendera, kebodohan yang luar biasa dan keterbelakangan budaya rakyat secara fundamental adalah disebabkan oleh sistem sosial yang ada dan kelembagaannya, yang menurut mereka tidak dapat melahirkan yang lain selain keadaan yang menyedihkan tersebut.

Karenanya, penyakit yang diderita rakyat miskin bukan akibat kurang berfungsinya suatu sistem sosial dan kelembagaannya, tapi memang 'inherent' ada dalam sistem sosial dan kelembagaan itu sendiri. Dalam anggapan dasar yang demikian, kelompok ini lalu mencoba dan mengembangkan suatu program transformasi atas sistem sosial dan basis ekonominya ke atas. Menurut kelompok ini, segala bentuk bantuan individual atau sumbangan kemanusiaan serta reformasi institusional tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan.



2.5 Akar Penyebab Kemiskinan

Menurut faktor yang melatarbelakanginya, akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron-client*, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan — dalam banyak hal — terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur



sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh,



pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut *unskilled labour*. Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah —yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah (Soedjatmoko, 1981: 46-61). Di kota seperti Surabaya, golongan masyarakat miskin ini umumnya tinggal di rumah-rumah petak atau permukiman kumuh yang padat, berjejal, dan sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal.

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya —kalaupun terjadi sifatnya lamban sekali— apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Mengapa bisa sampai begitu? Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan. Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud (1994: 143), adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual —pendek kata pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses



marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Pengertian dan definisi kemiskinan struktural, kendati menjadi alternatif konsep yang lebih disukai ilmuwan sosial. tetapi, kelebihan definisi seperti yang dikemukakan Selo Soemardjan di atas diakui atau tidak sesungguhnya cenderung bersifat ideologis —dalam arti definisi di atas populer karena di sana ada semangat dan nilai-nilai yang menggugat kemapanan dan status quo. Secara konseptual, definisi kemiskinan yang dikemukakan Selo Soemardjan sedikit-banyak bersifat normatif. Parsudi Suparlan, misalnya, seorang antropolog yang menyunting kumpulan tulisan tentang kemiskinan di perkotaan, dengan lugas menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan Selo Soemardjan kurang tajam dan tidak masuk akal (Suparlan, 1984: 14-15).

2.6. Perangkap Kemiskinan

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap —dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas— dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Robert Chambers, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan, menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu



guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackets* atau "roda penggerak kemiskinan" yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya

Ketidakterdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakterdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakterdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi (Loekman Soetrisno, dalam: Dewanta dkk., 1995: 19-20).

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu tetap *survive* dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang atau keluarga yang jatuh pada lingkaran setan atau perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan.

Secara empirik, banyak bukti memperlihatkan bahwa naiknya penduduk di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti penduduk tersebut hidupnya benar-benar bebas dari ancaman dan perangkap kemiskinan, melainkan penduduk tersebut sebenarnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang terendah —yaitu tahap *destitute*— ke tahap apa yang disebut sebagai *near*



poor. Dibandingkan dengan kelompok kemiskinan *destitute*, kelompok *near poor* hidupnya memang relatif lebih baik, namun belumbenar-benar stabil. Dalam arti bila sewaktu-waktu kelompok *near poor* ini menghadapi suatu krisis, maka dengan cepat kelompok *near poor* ini akan melorot lagi ke status *destitute*. Sebuah keluarga petani yang termasuk kelompok *near poor* tidak mustahil terpaksa turun kelas menjadi kelompok *destitute* bila tanpa diduga panen mereka tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau karena anjloknya harga jual di pasaran akibat ulah spekulan gabah.

Dalam kenyataan bahkan acap terjadi, kelompok masyarakat yang termasuk cukupan atau kaya –bukan kelompok *near poor*– tiba-tiba harus mengalami penurunan status yang drastis, yakni masuk ke dalam kelompok "keluarga miskin baru". Jadi, berbeda dengan kesan dan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini yang menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa turun dari waktu ke waktu, dalam kenyataan justru tidak jarang terjadi penambahan jumlah orang miskin. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto di sejumlah daerah di Jawa Timur menemukan bahwa kelompok masyarakat yang terpaksa turun statusnya dari kelompok cukupan menjadi "keluarga miskin baru" adalah kelompok petani cengkeh dan petani garam (Suyanto, 1996). Studi yang dilakukan Bagong Suyanto tersebut, walau dengan jumlah sampel yang terbatas, namun membuktikan bahwa usaha untuk memberantas kemiskinan memang bukan hal yang mudah, sebab apa yang dialami keluarga dan masyarakat miskin bukan sekedar kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya modal usaha saja, tetapi lebih dari itu yang sesungguhnya membelenggu keluarga dan masyarakat miskin adalah apa yang disebut Robert Chambers dengan istilah perangkap kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan.



2.7. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin – antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, PDM-DKE, program Takesra-Kukesra, JPS, PPK, dan lain-lain— membangun infrastruktur di permukiman umuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain. Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1995), pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari.



Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Dalam konteks ini, sebagai sebuah prakarsa baru, Program GERDU TASKIN sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, sejak awal disadari bahwa tujuan program ini adalah memandirikan dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan menurut kemampuan dan inisiatif mereka sendiri secara terpadu.

Namun demikian, selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan —baik di tingkat nasional, regional maupun lokal— umumnya adalah dengan menerapkan pendekatan ekonomi semata, yang seringkali kurang mengabaikan peran kebudayaan dan konteks lokal masyarakat. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan semacamnya (Karnaji dkk., 2000). Kendati secara harafiah nama berbagai program pengentasan kemiskinan dan program JPS berbeda-beda, tetapi substansinya sesungguhnya hampir sama, yakni memberikan aliran modal kepada masyarakat miskin dan meminta mereka bekerja lebih keras untuk memberdayakan dirinya sendiri. Memang, untuk jangka pendek pemberian bantuan ekonomi itu bisa bermanfaat. Tetapi, untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa



pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan problem-problem baru yang tidak kalah ruwetnya. Bahkan, tidak mustahil terjadi diperolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin (Mubyarto, 1985: 429). Sebabnya salah satunya adalah berpangkal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi, disisi lain, kesalahan juga bisa bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak bisa dielakkan masyarakat miskin, sering menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh bukan untuk kegiatan produktif, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif (Chambers, 1987).

Penelitian yang dilakukan Bagong Suyanto (1991-1995) tentang peran berbagai lembaga kredit pedesaan –seperti Perum Pegadaian, BPR, lembaga KURK, Kredit Usaha Tani, dan sebagainya– yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kegiatan produktif masyarakat, menemukan ternyata banyak nasabah yang memanfaatkan kredit yang diperolehnya itu bukan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, terutama untuk makan sehari-hari. Tekanan kebutuhan sehari-hari yang senantiasa mengancam dan kewajiban untuk menghidupi anak dan semacamnya telah membuat banyak keluarga atau golongan masyarakat miskin sulit untuk mengembangkan usahanya.

Sementara itu, studi yang dilakukan Bagong Suyanto dan Karnaji dkk. (2000) dalam batas-batas tertentu menemukan bahwa implementasi Program GERDU TASKIN di lapangan ternyata tidak selalu seperti yang diharapkan. Belum jelasnya siapa sebenarnya kelompok sasaran yang diprioritaskan, dan masih adanya ego sektoral di masing-masing departemen, serta ditambah lagi dengan orientasi program yang belum bersifat kontekstual, maka bisa dipahami jika pelaksanaan berbagai program penghapusan kemiskinan belum



memperlihatkan hasil dan daya ungkit yang memadai. Bahkan, dalam beberapa hal, pelaksanaan program GERDU TASKIN yang semula diharapkan dapat memberdayakan penduduk miskin, ternyata dalam kenyataan justru melahirkan bentuk ketergantungan baru dan berbagai penyimpangan yang menyebabkan pada akhirnya Program GERDU TASKIN menjadi tidak efektif. Kekurangan lain, dari berbagai program GERDU TASKIN adalah pada segi proses dan transparansinya. Ada kesan kuat, akibat kurangnya proses persiapan, khususnya program-program JPS, menyebabkan tahap penting dalam program GERDU TASKIN seperti keharusan untuk melakukan sosialisasi program menjadi kurang matang, dan pada akhirnya menyebabkan keterlibatan masyarakat untuk dapat ikut melakukan kontrol sosial menjadi lemah. Meski sulit untuk dikuantifisir, tetapi dalam banyak kasus acapkali ditemukan bahwa pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan rawan bias, dan bahkan rawan penyimpangan – termasuk rawan kebocoran.

2.8. Learning From The People

Untuk menghindari syakwasangka dan untuk memahami apa sebenarnya kebutuhan keluarga miskin, ada sejumlah petunjuk yang ditawarkan para ahli. Chambers (1983), misalnya, menyatakan ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi meruyaknya syakwasangka dan persepsi yang salah tentang keluarga miskin, yakni (1) menghilangkan sikap anti golongan miskin, (2) tinggal lebih lama dan pergi lebih jauh ke berbagai pelosok desa, dan (3) berlaku seperti orang atau rakyat kecil dan mau belajar dari mereka (*learning from the people*) --bukan *learning about the people*.

Kecenderungan untuk mengunjungi desa sepanjang jalan aspal yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan dapat dilawan dengan berjalan kaki lebih jauh dan keluar dari jalan raya atau jalan aspal. Kecenderungan untuk



hanya memusatkan perhatian kepada daerah proyek dapat diimbangi dengan kunjungan ke daerah lain yang di luar proyek atau dengan kunjungan yang tak dijadwalkan dan dilakukan secara sederhana untuk menghindari kesan yang menyesatkan.

Kecenderungan untuk menghubungi orang-orang tertentu, dapat diimbangi dengan kunjungan kepada keluarga miskin, sengaja menemui kaum wanita, menjenguk orang-orang yang sakit di rumahnya sendiri (bukan di klinik). Kecenderungan untuk melakukan kunjungan pada musim kemarau dapat dialihkan dengan kunjungan ke desa pada bulan-bulan penghujan atau setidaknya bertanya tentang keadaan mereka yang memburuk pada waktu itu.

Sementara itu, kecenderungan untuk bersikap sopan-santun dapat diubah dengan cara menjelaskan apa yang diinginkan, dan prasangka serta sikap keangkuhan yang biasa ada di lingkungan kaum profesional dapat diperbaiki dengan mencoba melakukan introspeksi untuk melihat keterbatasan diri sendiri dan selalu bertanya secara terbuka.

Pendek kata, agar para perencana pembangunan tidak memperoleh jawaban-jawaban semu dan kesan-kesan yang menyesatkan tentang kemiskinan -- menurut Chambers-- selain perlu kewaspadaan dan kecermatan, tidak bisa tidak kita harus bersedia mengubah cara pandang yang semula aristokratis ke model cara pandang yang berorientasi pada kerakyatan. Dengan menerapkan pendekatan *learning from the people*, akan mendorong dan memungkinkan orang untuk belajar dari bawah --yang di dalamnya mengandung proses saling belajar dan mendorong hubungan yang sederajat antara pencari dan pemberi informasi, yakni suatu sikap yang oleh Peter L. Berger (1977) disebut "penghormatan kognitif" dari orang yang berpendidikan dan berpengaruh kepada orang yang kurang berpendidikan dan tidak berpengaruh.



Satu contoh yang menarik: di Yogyakarta, Paulus Santosa dari rumah sakit Bethesda melatih para petugas gizi dengan menyuruh mereka belajar dari orang yang paling miskin --bukan dengan cara bersikap sok tahu dan berusaha mendidik cara hidup sehat menurut kacamata medis. Dengan kata lain, para peserta latihan gizi bukan diminta merumuskan strategi dan petunjuk cara hidup sehat menurut versi mereka atau menurut kelayakan medis, tetapi mereka justru diharuskan belajar dari keluarga miskin yang anak-anaknya sehat dan berat badannya normal.

2.9. Prasyarat

Pada batas-batas tertentu, mungkin benar bahwa kegagalan berbagai program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini disebabkan karena *moral hazard* atau *bad governance* dari rezim yang berkuasa. Tetapi, sekadar memperbaiki kualitas transparansi atau kontrol atas pelaksanaan kebijakan pembangunan sesungguhnya bukan jaminan bahwa otomatis kemudian akan terjadi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Upaya untuk memberdayakan kegiatan produktif masyarakat miskin dan meningkatkan posisi *bargaining* mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada masyarakat miskin. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan pasar yang tidak dibayang-bayangi dengan syakwasangka yang seringkali mendiskreditkan masyarakat miskin. Sedangkan yang dimaksud peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui



pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

Ibarat bermain bola, upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin niscaya tidak akan pernah bisa berhasil jika dilakukan secara sepotong-potong, temporer, dan apalagi jika semuanya dilakukan dengan tidak konsisten. Kegiatan pembangunan yang terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis dan dilakukan dengan berbagai prasangka yang keliru, niscaya hanya akan melahirkan kegagalan. Bahkan, tidak mustahil akan menyeret kembali Indonesia untuk terperosok pada situasi krisis gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat dan mematikan.

2.10. Metode dan Prosedur Kerja

Kegiatan ini pada dasarnya bukan hanya bermaksud mengkaji situasi problematik yang dihadapi keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara kontekstual, tetapi juga mencoba merumuskan kebijakan dan rencana aksi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk memperoleh masukan dan data yang akurat, dalam kegiatan ini bahan-bahan yang dibutuhkan telah dikumpulkan melalui beberapa cara, mengkaji dan menganalisis data sekunder terbaru mengenai kondisi kemiskinan dan kondisi demografis penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan kemiskinan, dinamika dan persebaran penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Kedua, melakukan *review* terhadap hasil-hasil studi mengenai masyarakat miskin dan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Review* terhadap hasil penelitian ini dibatasi hanya pada hasil penelitian terbaru yang relevan. Tujuan dilakukan *review* terhadap hasil studi tentang kemiskinan ini adalah untuk memperoleh kerangka acuan dan kerangka analisis dalam rangka memahami secara teoritik berbagai faktor penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat.

Ketiga, melakukan survey dan penggalian data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi terbaru dan berbagai tekanan yang dihadapi keluarga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data primer ini, digali dari masyarakat atau tepatnya keluarga-keluarga miskin yang ada di lokasi penelitian. Jumlah keluarga miskin yang menjadi responden, ditetapkan sebanyak 300 keluarga miskin. Lokasi penelitian ditetapkan di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di masing-masing kecamatan jumlah keluarga miskin yang diteliti ditetapkan sebanyak 200 keluarga miskin. Seluruh RTM yang diteliti akan dipilih dari data *by name by address* sesuai data PPLS Tahun 2011.

Keempat, dari 600 keluarga miskin yang diteliti, dalam studi ini kemudian dipilih 60 keluarga miskin yang telah dicoba diwawancarai secara mendalam (*indepth interview*), terutama menyangkut berbagai tekanan kemiskinan yang dialami, dan mekanisme survival yang dikembangkan untuk menyasiasi perubahan situasi yang menjejaskan mereka. *In-depth interview* dilakukan dengan mendasarkan pada *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara secara mendalam ini, bukan saja dapat diperoleh pengalaman langsung keluarga miskin menyasiasi keadaan, tetapi juga apa yang mereka butuhkan untuk melangsungkan kehidupan dan mengembangkan usahanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

kajian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, (2011), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Dalam tujuan penelitian ini, yaitu untuk terkumpulnya data secara kuantitatif mengenai Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode survey. Menurut Singarimbun dan Effendi (2008), mengatakan bahwa “penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok”. Metode survei ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sesuatu secara keseluruhan dari wilayah atau objek penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut berlaku umum untuk seluruh wilayah yang menjadi sasaran.



3.2. Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan kajian dengan jenis penelitian survei. Penelitian Survei adalah penelitian dengan memberi suatu batas yang jelas tentang data. Jenis penelitian survei ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui deskripsi kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2011), Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penyusunan kajian ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai daerah identifikasi program penanggulangan kemiskinan. Kecamatan Mesuji Makmur juga memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten OKI.



3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan Sampel dilakukan dengan Random Sampling. Menurut Sugiyono (2011) teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. selain itu simple random sampling dilakukan dengan metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

Menurut Slovin dalam Amirin (2011), pengambilan sampel menggunakan rumus dari Slovin untuk tingkat kesalahan 5% dan tingkat keyakinan sebesar 95%. Adapun rumus pengambilan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

- n : Besaran sampel
N : Besaran populasi
e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan

Kalkulator Statistik

RUMUS SAMPEL SLOVIN

Jumlah Populasi (N) *

Toleransi Error (e) *

Jumlah Sampel (n)



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 124.140 pada tahun 2019. Dengan populasi tersebut peneliti menarik jumlah responden sebanyak 398 Responden dan kita bulatkan menjadi 400 responden sebagai pertimbangan kesempurnaan pengambilan data dilapangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan instrumen berupa kuisioner. instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Arikunto (2006) menyatakan bahwa "Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai petani karet di Kecamatan Mesuji Makmur. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

3.6. Teknik Pengolahan Data

a. Analisis Statistik Deskripsif

Teknik analisa deskriptif merupakan salah satu jenis data yang dimaksudkan adalah untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau karakteristik dari masing-masing variabel penelitian secara tunggal yang menggunakan analisis distribusi



frekuensi, presentase, dan rata-rata (*mean*), serta standar deviasi.

Beberapa rumus yang digunakan :

1. **Rumus Presentase**

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Presentase

F : Frekuensi Jawaban Responden

N : Jumlah Responden/Sampel

2. **Rumus Rata-Rata (*mean*)**

$$M = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

M : Rata-rata

X : Nilai / Harga

N : Jumlah Data

3. Perhitungan Interval

Pada perhitungan interval ini menggunakan pendapat menurut Kiswanto³⁸ :

a) Jumlah Kelas Interval (K)

$$K=1+3,3 (\text{Log } N)$$

b) Rentang Data (R)

$$R= \text{Nilai data tertinggi-Nilai data terendah}$$

c) Lebar Interval

$$I=R/K$$

b. Uji Validitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS ini menggunakan Korelasi Product Moment. Validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesiner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Sebelum kita melakukan pengujian, baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu kuesioner bisa dikatakan valid dan reliabel. Penjelasan berikut:



Pertama, uji validitas

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung dan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan tidak valid. R hitung dicari dengan menggunakan program spss, sedangkan r tabel dicari dengan cara melihat tabel r dengan ketentuan r minimal adalah 0,3 (lihat buku sugiyono, 2011).

Berikut adalah tampilan uji validitas menggunakan SPSS

The screenshot shows the SPSS interface. On the left, the 'Bivariate...' dialog box is open, with the 'Bivariate' option selected. The main window displays a data view with columns for item7, item8, item9, item10, Pelayanan, and var1. The data values are as follows:

	item7	item8	item9	item10	Pelayanan	var1
0	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00	
0		5.00	5.00	5.00	45.00	
0		4.00	4.00	3.00	41.00	
0		6.00	5.00	2.00	47.00	
0		4.00	5.00	3.00	44.00	
0	5.00	5.00	4.00	4.00	46.00	
0	5.00	5.00	5.00	5.00	47.00	
0	5.00	6.00	5.00	4.00	45.00	
0	4.00	5.00	4.00	2.00	45.00	
0	5.00	4.00	5.00	5.00	44.00	
0	5.00	5.00	5.00	3.00	48.00	
0	4.00	6.00	5.00	5.00	48.00	
0	5.00	4.00	4.00	4.00	43.00	

hasil pengujian Validitas

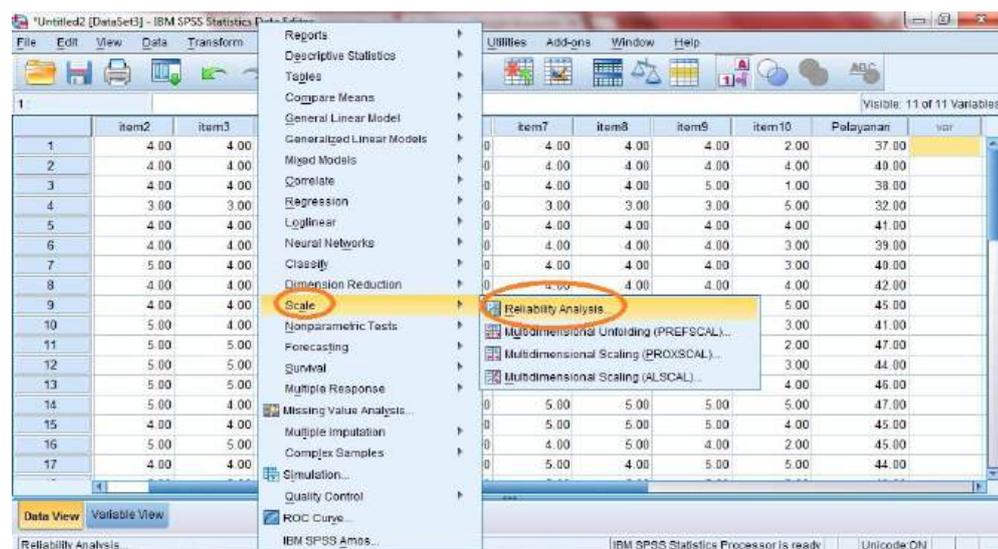
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Item10	Pelayanan
Item1	Pearson Correlation	1	.616	.735	.651	.596	.437	.259	.552	.545	-.087	.703
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.000	.004	.054	.270	.016	.192	.714	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Item2	Pearson Correlation	.616	1	.747	.607	.426	.349	.339	.426	.412	-.291	.704
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.005	.131	.199	.005	.071	.266	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Item3	Pearson Correlation	.735	.747	1	.614	.446	.369	.446	.417	.404	-.439	.670
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.048	.112	.048	.004	.078	.048	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Item4	Pearson Correlation	.651	.607	.614	1	.630	.439	.367	.493	.480	-.301	.741
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.018	.069	.112	.001	.042	.197	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Item5	Pearson Correlation	.596	.426	.446	.630	1	.719	.642	.694	.478	-.139	.741
	Sig. (2-tailed)	.009	.003	.048	.018		.000	.018	.001	.032	.848	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Item6	Pearson Correlation	.437	.349	.369	.439	.719	1	.719	.719	.640	-.159	.848
	Sig. (2-tailed)	.064	.131	.112	.048	.000		.000	.000	.002	.828	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



c. Uji Reliabilitas

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka cronbach alpha dengan ketentuan nilai cronbach alphan minimal adalah 0,6. Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan spss lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel.

Gambar Uji Reliabilitas:



Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan spss lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel.

The screenshot shows the 'Scale: ALL VARIABLES' dialog box. The 'Case Processing Summary' table shows 20 valid cases and 0 excluded cases. The 'Reliability Statistics' table shows a Cronbach's Alpha of .818 for 10 items.

Scale: ALL VARIABLES			
Case Processing Summary			
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			
Reliability Statistics			
	Cronbach's Alpha	.818	10 of Items



3.7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan perangkat software SPSS. Hasil analisis SPSS akan menampilkan beberapa informasi dari serangkaian hasil uji. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi), distribusi, dan representasi bergambar (grafik).

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan coding sebagai proses penganalisaan. Prosedur pengelolaan data setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Merujuk pada Prasetyo (2006) pengolahan data dilakukan dengan pertama, Pengkodean data (data coding) Pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah dari kuisioner dengan ketentuan yang ada, . kedua, adalah Pembersihan data yaitu memastikan seluruh data sesuai dengan data yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah Tabulating. Tabulating adalah memasukan data kedalam tabel-tabel tertentu dan mengitungnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini tahap analisis data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada responden disetiap kuisioner yang telah ada, sehingga pengolahan data terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. (2011). *Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ala, Andre Bayo, 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Adiningsih, Sri dkk., 2008. *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, Badai Pasti Berlalu?* Yogyakarta: Kanisius.
- BPS KABUPATEN OKI. (n.d.). Retrieved February 17, 2020, from <https://okikab.bps.go.id/dynamictable/2019/12/17/170/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan-2010-2019.html>
- Chambers, Robert, 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Dillon, HS., dan Hermanto, 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, Prisma No.3 Th. XII/1993, LP3ES Jakarta hal. 11-21.
- Fakih, Mansour, 2003. *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press.
- Galbraith, John Kenneth, 1983. *Hakikat Kemiskinan Massa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ghose, Ajit K.& Keith Griffin, 1983. *Kemiskinan di Daerah Pedesaan dan Alternatif Pembangunan*, dalam: *Seri Wawancara, Hak dan Kebutuhan Desa*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Grand, Guy, 1983. *Development by People*, Praeger Special Studies, Praeger Publishers USA.



- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Korten, D.C., dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masri, S. dan S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Prasetyo, B. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lewis, John P. dan Valerian Kallab (penyunting), 1987. *Mengkaji Ulang Strategi-strategi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mudrajad Kuncoro, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Rachbini, Didik, J., 1995. *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad Lincoln, 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho, 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media.



- Sherraden, Michael, 2006. *Aset Untuk Orang Miskin, Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sen, Amartya, 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred a. Knoff, Inc.
- Ul Haq, Mahbub, 1983. *Tirai Kemiskinan Tantangan Untuk Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yustika, Ahmad Erani, 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yustika, Ahmad Erani, 2007. *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pasca Krisis*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Wie, Thee Kian. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES.
- Walsh, Thomas & Harry Wibowo (Penyunting), 2003. *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai Makalah Terpilih Konferensi INFID 2002*. Jakarta: INFID.
- Waidl, Abdul, Arie Sudjito & sugeng Bahagijo (eds.), 2008. *Mendahulukan si Miskin, Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: Lkis.

